



KOMITE LSM-LSM UNTUK BIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Desember 2014

UTAMAKAN MANUSIA DAN BUMI: PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENUNTUT KEBERANIAN POLITIS

Munculnya banyak krisis yang dihadapi dunia kita dan bangsa-bangsa dewasa ini merupakan bukti nyata bahwa pengambilan keputusan menyangkut anggaran dan sistem-sistem keuangan internasional lebih membawa kebaikan untuk sekelompok kecil orang dan kerugian bagi sebagian besar orang, dan lebih berpihak kepada keuntungan pribadi yang tidak adil daripada kesehatan seluruh planet bumi. Meski sudah ada upaya-upaya yang signifikan oleh masyarakat global untuk mengimplementasikan Tujuan-Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals), sebagian besar orang masih hidup dalam kemiskinan, sementara segelintir orang menumpuk kekayaan melimpah, dan pertumbuhan serta konsumsi yang sembarangan sedang menghancurkan bumi.

Dunia punya uang dan orang-orang ahli untuk memecahkan masalah-masalah ini, namun kita perlu mengalokasikannya secara lebih baik. Masalahnya bukan pada cukup-tidaknya uang; itu soal ada-tidaknya keberanian politis. Pembangunan berkelanjutan itu sebuah isu ekonomi sekaligus etis. Mengeluarkan dana untuk senjata ketimbang untuk obat dan pendidikan merupakan sebuah pilihan yang keliru yang harus ditantang. Tak ada alasan yang dapat dibenarkan bahwa pengeluaran global tahunan untuk perang dan kekerasan mesti 600 kali lebih besar daripada pengeluaran untuk perdamaian dan kemajuan sosial, sebagaimana telah diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Kita dapat mengubah prioritas-prioritas anggaran dengan kemauan politik. Masyarakat sipil, dengan perspektif akar-rumputnya, mendapat tempat yang unik untuk menyampaikan seruan-seruan moral guna mengurangi kesenjangan-kesenjangan dan menjamin kesehatan planet kita, dan karenanya harus didengarkan. Pengalaman-pengalaman masyarakat sipil di kawasan-kawasan yang belum maju harus disyerinkan dan orang-orang yang hidup dalam keterbatasan (akses dan kontrol) harus punya suara yang kuat di dalam perencanaan ekonomi global. Masyarakat sipil punya pengetahuan yang berharga mengenai bagaimana mengimplementasi, pengetahuan mana perlu dimiliki dengan arif pula oleh para pengambil kebijakan.

Membaharui dan mereformasi arsitektur keuangan global telah menjadi agenda pembangunan sejak berdekade-dekade, namun cuma sedikit yang berubah. Inilah contoh dari prioritas-prioritas yang salah-letak. Sudah waktunya bagi umat manusia dan planet bumi untuk mendapatkan keuntungan dari system-sistem keuangan global yang transparan, partisipatif, adil, inklusif, dan aman dari kegagalan. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berada pada pusat proses pembaruan tersebut. Negara-negara sedang berkembang mempunyai lebih banyak input dan pengaruh di PBB daripada di forum-forum ekonomi lainnya seperti G20, Bank Dunia, IMF, dan Paris Club. Keseimbangan itu amat penting bagi kredibilitas dan kelangsungan hidup.

Keseimbangan juga amat penting dalam kemitraan publik/privat jika mereka hendak menjadi sumber daya utama pembiayaan pembangunan berkelanjutan pasca-2015. Pendekatan multi-facet (aneka segi) untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan perlu dilakukan dengan hati-hati. Bagaimana kita membiayai menentukan apa yang kita biayai. Proyek-proyek umum jangka panjang tidak boleh dilakukan tergesa-gesa demi keuntungan-keuntungan perusahaan. Privatisasi keuntungan tanpa sosialisasi kerugian (dampak negatif) tidak dapat ditolerir.

Karena itu, komite lsm-lsm untuk bidang pembiayaan pembangunan meminta dengan sangat untuk:

- Pertama-tama menempatkan kebutuhan-kebutuhan manusia dan bumi pada jantung semua upaya ekonomi global;
- Sungguh mengetahui bahwa pembiayaan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu moral sekaligus ekonomi;
- Membangun kemauan politis untuk merelokasi sumber-sumber daya guna menjawab prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan;
- Perwakilan dan suara yang setara bagi negara-negara sedang berkembang di dalam semua forum ekonomi;
- Pembaruan lembaga-lembaga dan system-sistem keuangan internasional melalui PBB;
- Kerangka berpikir hak asasi manusia menjadi penuntun dalam pembiayaan, perpajakan, perdagangan dan bisnis internasional;
- Monitoring, transparansi, dan akuntabilitas bagi semua pemangku kepentingan.